



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2017

Kalajadi Sosial

Kegiatan Kementerian Pertanian RI
dengan
Dewan Perwakilan Rakyat /
Dewan Perwakilan Daerah RI
Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2017 - 2018



Pengarah **Penanggung Jawab**
Dr. Ir, Suwandi, M.Si Ir. Muhamad Yunus, MM

Editor **Redaksi dan Layout**
Lilli Fatima, S.Sos Ade Nurtejo, SS

Anggota
RR. Saryati
Musmita, SE
Farah Inayati, SH
Yuli Martono, S.Hum

Kata Pengantar

Redaksi

Daftar Isi

BAB I

RAPAT KERJA/RAPAT DENGAR PENDAPAT

Raker Komisi IV DPR-RI dengan Mentan tanggal 11 September 2017
Raker Komisi IV DPR-RI dengan Mentan tanggal 17 Oktober 2017
RDP Komisi IV DPR-RI dengan Dirjen PSP tanggal 14 September 2017

BAB II

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR-RI

Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Barat (Cirebon)
Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Utara (Kab. Meranti)
Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Tengah (Solo)
Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur (Lamongan)

BAB III

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Barat
Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sulawesi Barat
Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Timur
Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB IV

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMITE II DPD-RI

Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur (Gresik)
Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat (Padang)
Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar)
Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Pontianak)
Kunjungan Kerja ke Provinsi Bangka Belitung (Belitung)

BAB V

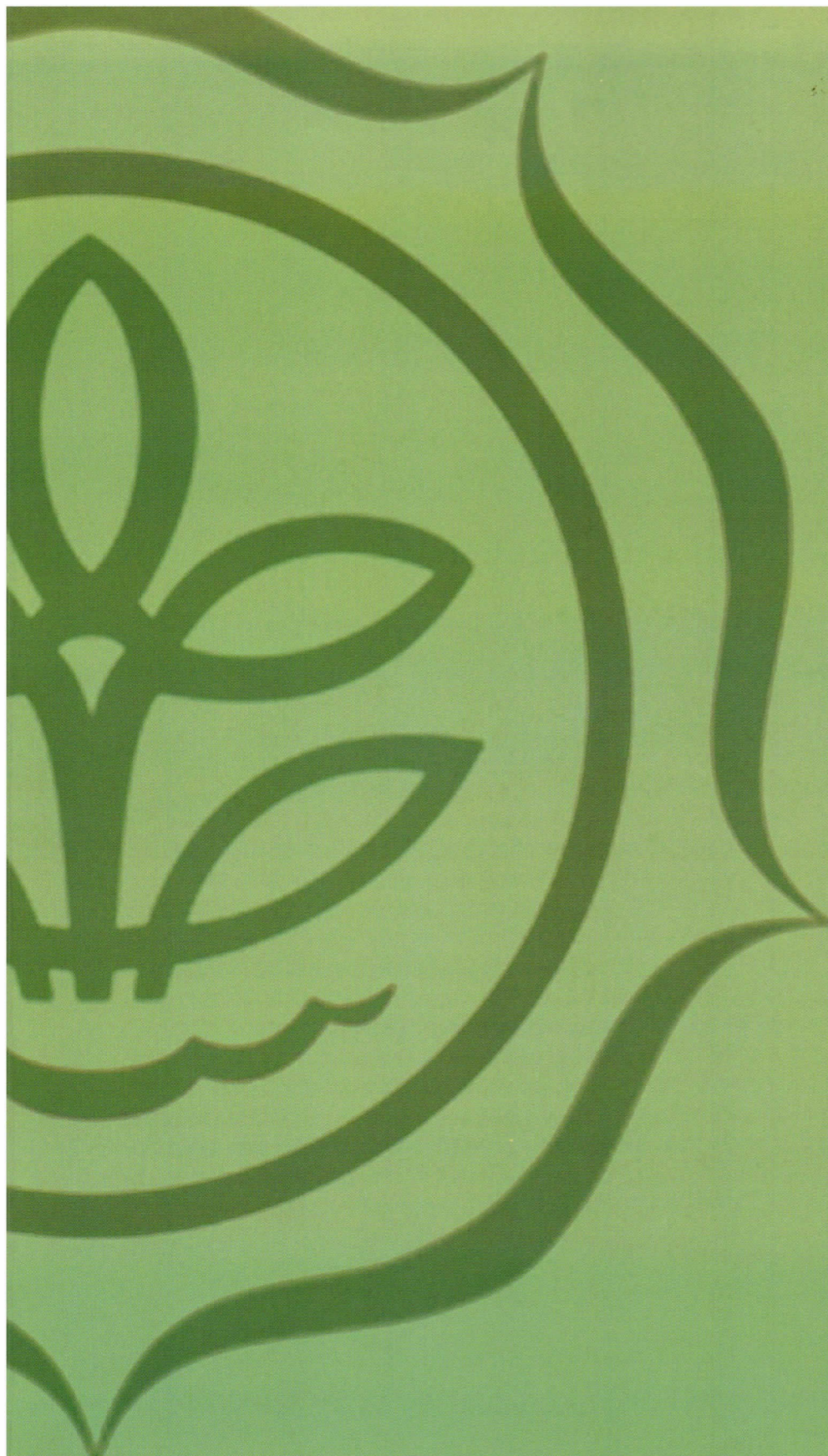
PENGHARGAAN TELADAN NASIONAL





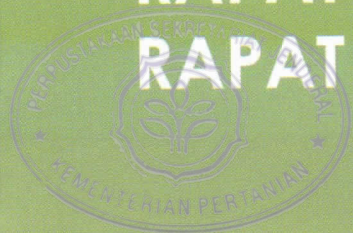
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA





BAB I

RAPAT KERJA /
RAPAT DENGAR PENDAPAT





Komisi IV DPR-RI meminta Menteri Pertanian sebagai koordinator Pembahasan RU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Pemerintah bersama-sama Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membicarakan kembali dengan Presiden dan segera ada keputusan atas usulan DPR-RI terkait dengan penyatuan Kelembagaan Karantina.

Dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018, Komisi IV DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, khususnya mengenai kelembagaan. Hadir dalam rapat kerja ini 34 anggota dari 50 anggota Komisi IV DPR-RI.



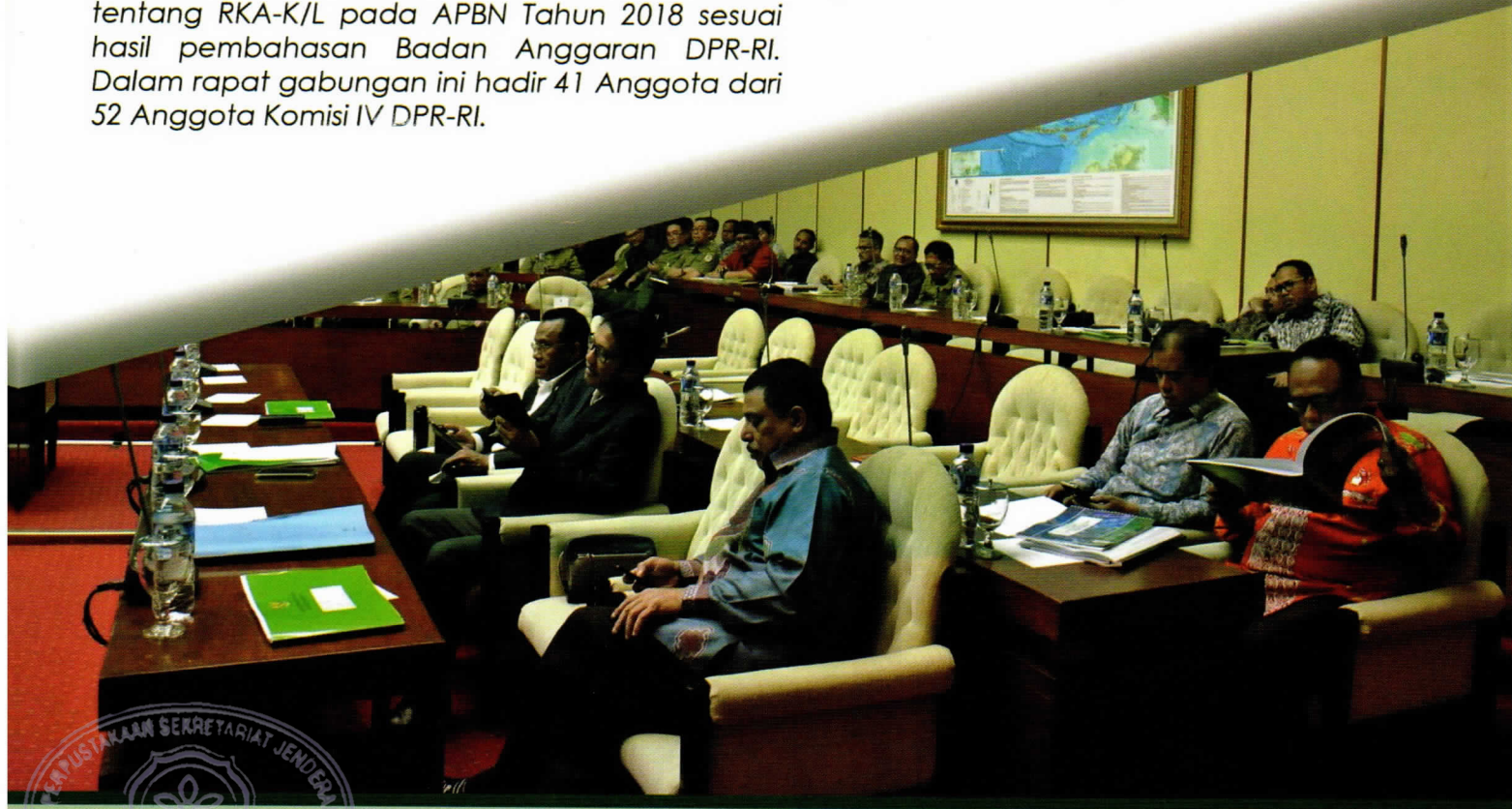


Rapat Kerja Menteri Pertanian



Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu APBN Kementerian Pertanian pada RKA-K/L Tahun 2018 sebesar Rp. 23.820.762.303.000,-. Komisi IV DPR-RI juga menyetujui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian pada APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 1.681.700.000.000,- yang terdiri dari DAK Provinsi sebesar Rp. 291.000.000.000,- dan DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.390.700.000.000,-.

Dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018, Komisi IV DPR RI mengadakan Raker dengan Menteri Pertanian yang diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2017 membahas tentang RKA-K/L pada APBN Tahun 2018 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR-RI. Dalam rapat gabungan ini hadir 41 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR-RI.





Rapat Kerja Menteri Pertanian



Dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018, Komisi IV DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Asuransi Pertanian dan Nelayan. Hadir dalam RDP ini 29 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR-RI.

Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah c.q Ditjen PSP Kementan, Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Budidaya KKP, dan PT. Jasindo untuk terus meningkatkan pelayanan dan menyempurnakan prosedur perasuransian bagi Asuransi Pertanian, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah c.q Kementan, KKP mengalokasikan anggaran tambahan untuk Asuransi Pertanian dan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada APBN Tahun 2018, sehingga penerima asuransi mendapatkan jaminan premi secara lebih luas dan berkelanjutan.







KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA





BAB II

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IV DPR-RI



Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR-RI ke Propinsi Jawa Barat



Aksi penyegelan yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap Pabrik Gula (PG) Tersana Baru milik BUMN PT. Rajawali Nusantara Indonesia II di Cirebon, Jawa Barat, tergolong kasus baru. Sehingga membuat resah masyarakat terutama para petani. Penyegelan dilakukan karena mutu gula yang dihasilkan tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

DALAM PENGAWASAN
DITJEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.

DALAM PENGAWASAN
DITJEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.



Wakil Ketua Komisi IV DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR Herman Khaeron, meminta kepada otoritas keamanan pangan dan perdagangan untuk tidak mengambil tindakan yang dapat meresahkan masyarakat apabila menemukan sesuatu hal yang menyangkut hajat hidup rakyat. Aksi penyegelan pabrik gula di PT Tersana Baru yang meresahkan masyarakat ini harus kita hindari. Kedepan harus ada upaya yang lebih baik, gunakan pendekatan persuasif.





Saat ini, lanjut politisi asal Demokrat itu, pemerintah sedang berupaya untuk bisa swasembada gula. Salah satu caranya dengan berusaha mensejahterakan petani agar senantiasa selalu bercocok tanam tebu. Bagaimana swasembada bisa terwujud kalau lahan terus menyusut setiap tahun. Solusi keberlangsungan usaha ini ada di tangan petani, mereka harus didukung, dibekali pengetahuan, modal, dan aturan yang sedikit dilonggarkan, agar ke depan minat untuk bertani tebu semakin tinggi dan jalan menuju swasembada pangan semakin dekat, jangan seperti ini.

Mutu gula yang tidak baik bukan semata-mata karena proses yang salah, tapi bisa jadi karena cara penyimpanan gula yang terlalu lama. Sehingga mengubah nilai kandungan dalam gula. Padahal hasil uji lab BPOM menyebutkan bahwa gula tersebut tidak mengandung bahaya dan layak dikonsumsi, hanya perlu di reproduksi. Penyegekan ini hanya masalah komunikasi yang kurang baik antara BUMN dan Kementerian Perdagangan. Komisi IV DPR-RI berharap kedepan ini tidak terjadi lagi. Sebab, dampak dari penyegekan ini bukan hanya dirasakan oleh BUMN yang menjual gula-gula tersebut, tetapi juga berdampak pada para petani tebu.



Kunjungan Kerja Spesifik **Komisi IV DPR-RI ke Propinsi Riau**



Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI bersama Dirjen Perkebunan dan Direktur Irigasi Pertanian di Kepulauan Rangsang tepatnya di Kecamatan Rangsang Barat, Desa Sigomeng dan Desa Sungai Cina dalam rangka program Pengelolaan Lahan Cetak Sawah Pertanian di Kecamatan Rangsang Barat diharapkan membuahkan dukungan program APBN bagi kemajuan sektor pertanian dan perkebunan di daerah ini. Rombongan Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan ini, dipimpin anggota Komisi IV, Ir. Effendy Sianipar, bersama Dirjen Perkebunan, Ir. Bambang, MM dan Direktur Irigasi Pertanian, Ir. Tunggul Iman Panudju, MSc.





Saat peninjauan di lapangan,

rombongan didampingi Sekretaris Daerah Kepulauan

Meranti, Yulian Norwis, SE, MM bersama Ketua Komisi B DPRD Kepulauan

Meranti, Darwin Susandy, serta anggota DPRD lainnya, Azni Syafri dan Asmawi.

Namun demikian, hingga saat ini masih banyak masalah pertanian yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Meranti, Khususnya di Kecamatan Rangsang Barat, dimana harga gabah program nasional dinilai lebih murah dari harga pasaran. Mahalnya harga gabah itu karena biaya transportasi yang mahal di daerah ini, sawah disini juga hanyalah sawah tadah hujan yang hanya bisa panen setahun sekali, disamping masalah abrasi yang cukup parah dan tanggul air laut yang belum memadai.



Program pengelolaan cetak sawah merupakan program yang cemerlang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kita minta kepada Pemkab Kepulauan Meranti ditambah harus benar-benar serius menyalahi program dari wakil rakyat, agar ke depan Pemkab Meranti tidak tergantung lagi terhadap migas yang tidak lama lagi akan kering dari perut bumi di pulau jantan kabupaten bungsu ini.





Program pengelolaan cetak sawah merupakan program yang cemerlang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kita minta kepada Pemkab Kepulauan Meranti ditambah harus benar-benar serius melaksanakan program dari wakil rakyat, agar ke depan Pemkab Meranti tidak tergantung lagi terhadap migas yang tidak lama lagi akan kering dari perut bumi di pulau jantan kabupaten bungsu ini. Pemerintah perlu lebih fokus ke produksi sagu, karena Meranti terkenal dengan produksi sagu. Selain itu kepulauan Meranti penghasil terbesar kedua di Indonesia atas produksi sagu setelah Papua. Namun lanjutnya, masih banyak keluhan dari masyarakat setempat bahwa pengolahan sagu ini belum maksimal.



Kunjungan Kerja Spesifik **Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Jawa Tengah**



Peninjauan embung di Desa Kismoyo, Kecamatan Ngemplak, Kab. Boyolali

Air yang ada di wilayah tersebut berasal dari waduk cengklik. Pompa untuk menaikkan air dari sungai merupakan bantuan DAK tahun 2016. Untuk operasional pompa tersebut per hari menghabiskan 10 sampai dengan 15 liter solar. Wilayah tersebut memiliki kondisi tanah yang labil sehigga jika musim kemarau akan kering. Petani di daerah tersebut siap untuk menerima bantuan pupuk organik. Petani memohon agar bisa diberikan bantuan normalisasi sungai untuk membersihkan sedimen dan pengerukan dasar sungai. Dengan adanya bantuan pompa maka bisa membantu petani panen tiga kali setahun. Saat ini petani sudah mengajukan poposal ke balai besar untuk membuat bendungan kecil agar suplai air ke pompa bisa lebih baik. Dalam kesempatan tersebut pimpinan rombongan kunker spesifik Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menghargai adanya upaya swadaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat.





Terkait permintaan bantuan empat pompa baru dan satu embung, beliau memohon agar Ditjen PSP mempelajarinya dulu. Petani yang hadir dalam acara tersebut menyatakan bahwa irigasi teknis ini sudah ada dari tahun 1982. Beliau memohon agar segera direalisasikan bantuan tersebut karena manfaatnya untuk 2.120 hektar lahan pertanian. Awalnya waduk yang ada memiliki kapasitas 12,5 juta meter kubik air pada tahun 1995 kemudian mengalami penurunan. Setelah diperbaiki kapasitas naik menjadi 9,5 juta meter kubik, mohon agar bisa dikembalikan ke kapasitas awal. Revitalisasi saluran sekunder sudah dianggarkan, tinggal waduknya di optimalkan agar bisa terairi dengan baik. Saat ini ada Perpres tentang pembinaan P3A, tolong P3A pembinaanya dikembalikan ke Kemenpupera bukan di Kementan. Kemudian hadir juga Kades Kismoyoso yang mengatakan bahwa desa ini termasuk wilayah banjir dan mohon adanya bantuan normalisasi sungai. Bantuan satu pompa hanya bisa mengairi untuk 10 hektar sehingga warga membuat sumur pantek sendiri. Selain itu pemerintah desa juga sudah membuat jalan tani desa.





Peninjauan Desa Mandiri Benih di Desa Dukuh, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo

Pimpinan rombongan Kunker Spesifik Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan bahwa negara kita masih kekurangan benih, benih sangat penting karena menentukan keterjangkauan dan ketersediaan pangan.

Jika benih masih impor maka masih menjadi persoalan. Dalam kesempatan itu ketua gapoktan tunas harapan mengatakan bahwa gapoktannya berdiri tahun 2007, luas lahan 10 Ha dengan 22 petani. Bantuan dari Ditjen TP sebesar 170 juta tahun 2015 lewat APBN-P diberikan berupa sertifikat, alat, gudang dan lantai jemur.

Sedangkan tahun 2016 terdapat bantuan dan kegiatan benih sumber inpari 250 kg, kendaraan roda 3 dan pelatihan. Manfaat bantuan benih yaitu memenuhi kebutuhan benih bersertifikat dengan produkti 5 ton per hektar dan bisa memenuhi benih yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Kunjungan Kerja Spesifik **Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Jawa Timur**



Pemkab Lamongan mendapatkan bantuan 154 unit alat mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah pusat. Sebanyak 154 unit Alsintan itu diberikan secara simbolis di Alun-Alun Lamongan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 ini mendapatkan bantuan alsintan sebanyak 154 unit. Dengan rincian 74 unit handtractor, 12 unit traktor roda empat, 12 unit transplanter dan 56 unit pompa air. Hadir pada acara ini Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Abdul Madjid dan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Aries Setiadi. Sementara Bupati Fadeli menyebut bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian yang difasilitasi Komisi IV DPR RI itu akan sangat mendukung modernisasi pertanian di Lamongan.





Pada tahun ini produktivitas pertanian jagung di Kabupaten Lamongan telah mencapai 12,86 ton per hektare. Kemudian jumlah luas tanam jagung yang sebelumnya hanya 58 ribu hektare, sekarang telah naik menjadi 68 ribu hektare. Sedangkan untuk produksi jagung yang sebelumnya hanya 372 ribu ton, saat ini telah mencapai 500 ribu ton, atau naik 30 persen. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa bantuan ini berasal dari dana APBN, berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat Lamongan. Pada tahun 2018 mendatang akan kembali ditambah jumlah bantuan alsintan kepada petani di Kabupaten Lamongan. Dia juga berharap agar alsintan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terlebih Lamongan sudah menjadi perbincangan nasional terkait kemajuan pertaniannya. Semoga bantuan alsintan ini dapat mendukung pertanian di Kabupaten Lamongan menuju modernisasi. Sebagian besar warga di Lamongan adalah petani. Maka itu harus terus dilakukan upaya modernisasi yakni penggunaan alat mesin pertanian agar pengolahan area pertanian dapat dilakukan dengan maksimal dan efektif. Hasil panennya terus meningkat. Bibit unggul menjadi faktor penentu hasil panen. Maka petani harus menggunakan bibit varitas unggul. Dipastikan perpaduan modernisasi alat dengan bibit unggul menghasilkan panen yang luar biasa.





“Modernisasi alat pertanian diharapkan bisa mempermudah petani dalam mengolah lahan pertaniannya serta mampu meningkatkan hasil panen sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat.”

- Viva Yoga Mauladi -





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA





BAB III

KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI IV DPR-RI



*Kunjungan Kerja***Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Sumatera Barat**

Dalam kunker ini, Komisi IV DPR-RI melakukan tinjauan langsung ke lokasi perhutanan sosial di Nagari Sungai Buluh Batang Anai, kawasan pertanian optimalisasi alsintan di persawahan Sungai Sapih, lalu dilanjutkan ke pelabuhan ikan di Bungus, selain itu juga meninjau langsung gudang Bulog dan Pupuk di Sumbar. Tim Kunker Komisi IV juga didampingi Dirjen PSP Kementan, Dirjen Riset dan Pengembangan SDM Kementan, Direktur Perhutanan Sosial dan Kemitraan. Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengapresiasi para pekerja di sektor pangan yang telah berdedikasi mengusahakan ketahanan dan mewujudkan kedaulatan pangan. Komisi IV telah melihat dan bertemu dengan kelompok tani langsung. Bagaimana antusiasme di lapangan ini terhadap bantuan-bantuan yang dibangun disepakati di Komisi IV DPR-RI, tinggal ada beberapa hal yang belum tersambung di saluran air, ini harus diselesaikan segera dalam jangka pendek.





Di Kantor Gubernur Sumbar, Tim Komisi IV mendengar pandangan dan pendapat Gubernur Irwan Prayitno, tentang pembangunan sektor pertanian, kehutanan, Kelautan dan perikanan. Dalam kesempatan tersebut, Irwan meminta dukungan Komisi IV agar bisa turut serta mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan. Ia juga menyampaikan pembangunan dalam sektor pangan dan kehutanan di Sumbar merupakan keniscayaan. Mengingat sebagian besar lingkungan Sumbar didominasi oleh hutan, ault dan lahan pertanian.





Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Barat



Petani kakao di Mamuju, Sulawesi Barat menghadapi banyak masalah. Dari persoalan akses bibit, pupuk NPK Phonska, hama, hingga lahan, jadi keluhan mayoritas petani kakao. Inilah temuan yang didapat Tim Komisi IV DPR-RI bersama dengan Direktur Jenderal Perkebunan, saat berkunjung ke Mamuju, Sulawesi Barat, tepatnya di Kebun Raya Pertanian Desa Batuampa, Kecamatan Papalang. Masalah ini telah menurunkan produktivitas petani setempat. Saat berdialog, para petani kakao tersebut meminta bantuan Komisi IV DPR-RI atas masalah yang dihadapi. Selama ini, bibit kakao didatangkan dari luar Sulbar. Mestinya, keluhan para petani, bibit kakao didatangkan dari Sulbar sendiri. Langkah ini bisa mensejahterakan para petani Sulbar dari hasil pembibitan. Dinas Pertanian setempat harus turun ke lapangan memberi penyuluhan kepada petani di Mamuju, agar kerusakan kakao tidak semakin parah.





PERTEMUAN DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA DAN RESES KOMISI IV DPR RI DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Mamuju, 31 Juli 2017



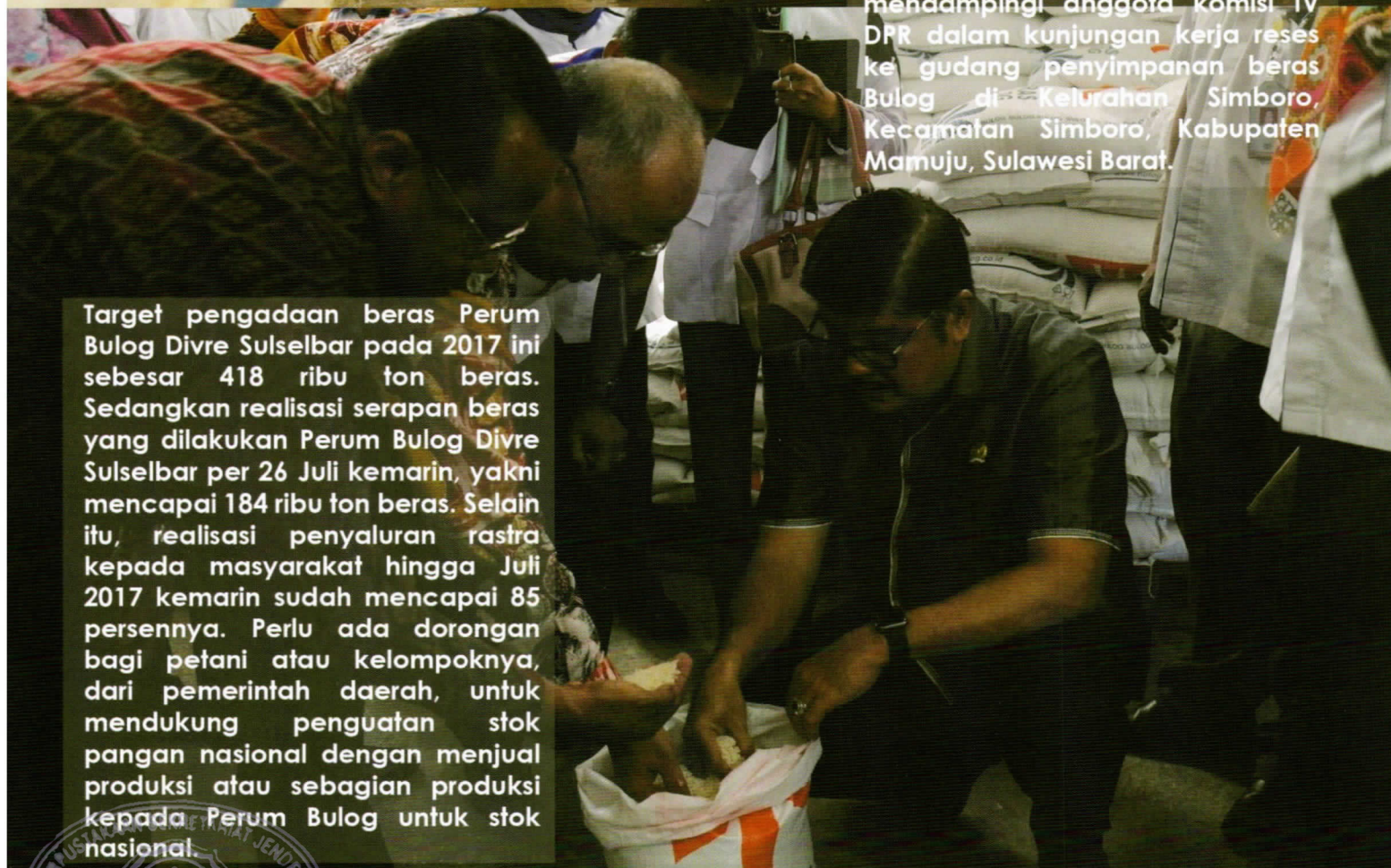
Kunjungan dilanjutkan ramah tamah di Auditorium Kantor Gubernur. Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang, Kasrem 142 Tatag. Gubernur mengatakan bahwa dari enam kabupaten yang dimiliki Sulbar mempunyai berbagai potensi yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Sulbar bisa menjadi bagian mengekspor beras besar di Indonesia dimana pertahun kurang lebih 200 ton. Sulbar juga memiliki kakako, kelapa sawit dan kelapa dalam, adapun potensi perikanan ada rumput laut, pertambakan hampir 20 ribu hektare yang ada di Sulbar dan mudah-mudahan kedepan bisa kembangkan sehingga bisa sejajar dengan provinsi lainnya. Adapun kendala dalam pembangunan selama ini baik itu pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan yang baru saja berjalan selama kurang lebih dua bulan adalah dari segi infrastruktur.





Stok operasional beras Bulog dari Divisi Regional (Divre) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) sebesar 148.846 ton. Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono menyatakan ketahanan stok ini mampu bertahan hingga 20 bulan.

Hal demikian disampaikan saat mendampingi anggota komisi IV DPR dalam kunjungan kerja reses ke gudang penyimpanan beras Bulog di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.



Target pengadaan beras Perum Bulog Divre Sulselbar pada 2017 ini sebesar 418 ribu ton beras. Sedangkan realisasi serapan beras yang dilakukan Perum Bulog Divre Sulselbar per 26 Juli kemarin, yakni mencapai 184 ribu ton beras. Selain itu, realisasi penyaluran rastra kepada masyarakat hingga Juli 2017 kemarin sudah mencapai 85 persennya. Perlu ada dorongan bagi petani atau kelompoknya, dari pemerintah daerah, untuk mendukung penguatan stok pangan nasional dengan menjual produksi atau sebagian produksi kepada Perum Bulog untuk stok nasional.

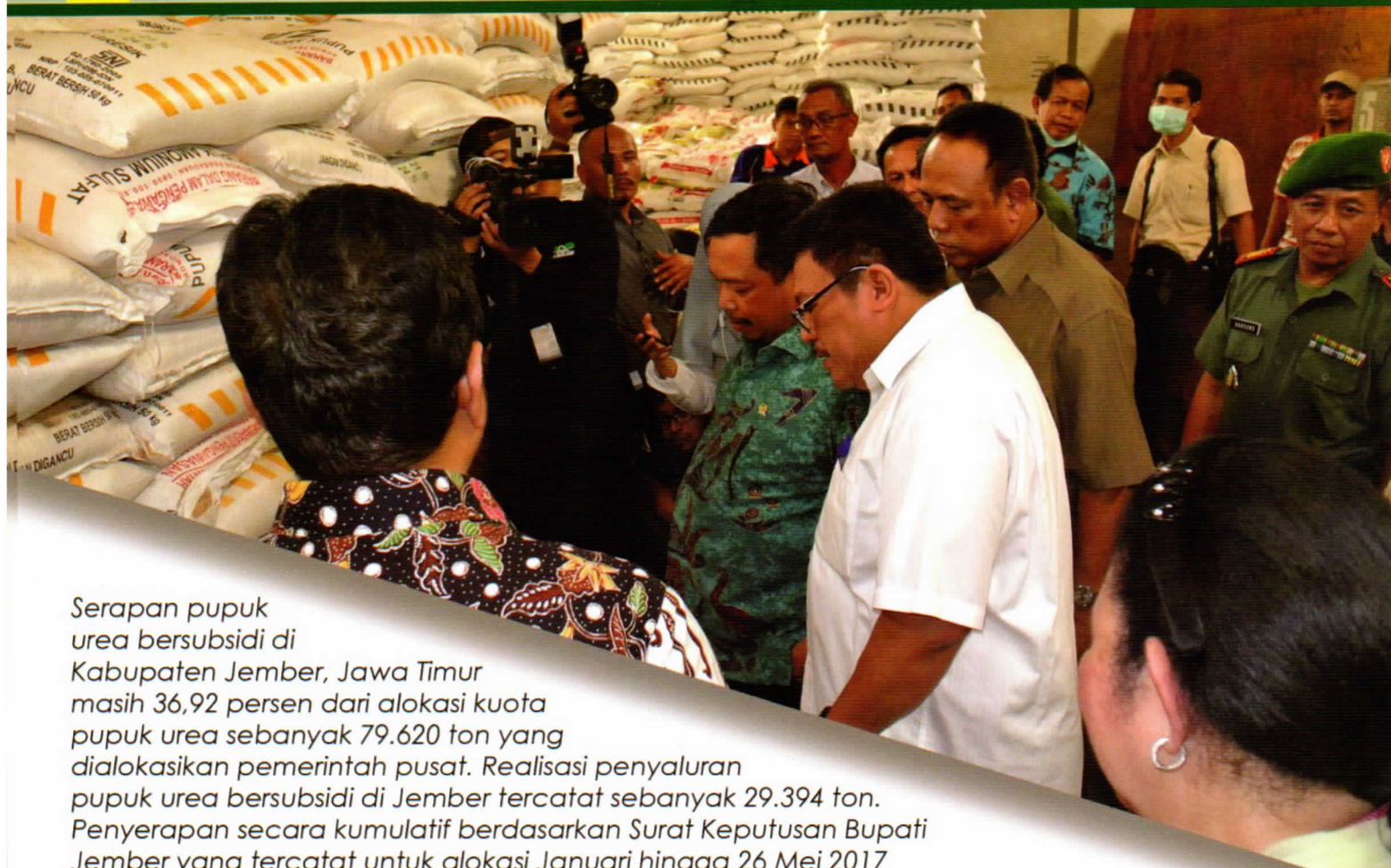


Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Jawa Timur



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menegaskan bahwa pemerintah perlu memperbaiki manajemen penataan beras dalam perberasan nasional. Hal ini dikatakannya saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV bersama Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dengan Bulog di Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur. Harga eceran tertinggi atau harga acuan untuk melakukan intervensi terhadap harga beras, perlu dilakukan penataan secara nasional. Selama ini, lanjutnya, Bulog membeli gabah atau beras petani dengan acuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ketika harga gabah petani anjlok. Sedangkan pada saat harga beras tinggi, pemerintah menggunakan harga acuan untuk melakukan intervensi dengan melakukan operasi pasar. Ada kekhawatiran ketika HPP dinaikkan akan berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran yang dapat menyebabkan inflasi.





Serapan pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur masih 36,92 persen dari alokasi kuota pupuk urea sebanyak 79.620 ton yang dialokasikan pemerintah pusat. Realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi di Jember tercatat sebanyak 29.394 ton. Penyerapan secara kumulatif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember yang tercatat untuk alokasi Januari hingga 26 Mei 2017 sebanyak 31.936 ton, sehingga realisasi penyerapan di lapangan lebih rendah karena berbagai faktor. Cuaca ekstrem menyebabkan serapan pupuk urea rendah karena sebagian petani beralih menggunakan pupuk jenis ZA akibat curah hujan yang mengguyur lahan pertanian di Kabupaten Jember cukup tinggi. Selain itu, banyak petani yang masih menyimpan stok pupuk pada akhir Desember 2016 yang akan digunakan untuk bulan Januari 2017, sehingga faktor itu yang menyebabkan terserapnya pupuk urea pada musim tanam awal tahun ini masih rendah.





Kelompok Tani yang melakukan Budidaya Pisang Mas Kirana sebanyak 20 Kelompok Tani yang tersebar di Kecamatan Senduro, Pasrujambe, dan Gucialit. Saat ini Kelompok Tani yang berada di Kab. Lumajang sudah tergabung dalam Asosiasi Petani Pisang Seroja Kab. Lumajang yang beralamat di Desa Kandangan Kecamatan Senduri Kabupaten Lumajang. Rombongan disambut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Ir. Paiman beserta jajarannya. Rombongan juga diperlihatkan komoditas binaan dinastan Kab. Lumajang. Pisang Mas Kirana merupakan produk unggulan Kab. Lumajang yang sudah terbukti banyak peminat. Nama kirana pada Pisang Mas Kirana diambil dari nama Raja Lumajang yang bernama Nararya Kirana.



*Kunjungan Kerja***Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Jambi**

Tim Komisi IV DPR RI berkunjung ke Gudang Bulog Pasir Putih Divre Jambi dalam rangka untuk melihat persediaan beras yang ada. Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengapresiasi gudang bulog yang ada di Pasir Putih ini. Tempatnya bersih dan asri, semua tertata dengan baik dan rapi.

Ia melihat stok beras yang ada di bulog saat ini termasuk stok yang baik. Selain itu juga ada pemisahan antara beras rastra dan beras subsidi, serta gula.

Ia mengatakan inovasi dalam pengembangan usaha itu penting. Contoh seperti yang dilakukan Perum Bulog yaitu Rumah Pangan Kita, ini perpanjangan dari kerja Perum Bulog.

Selain itu ia menambahkan bulog sendiri adalah untuk stabilisasi harga beras. Apalagi menurutnya beras ini suka dipermainkan di pasar. Fungsi bulog untuk mengatur harga, selain itu Komisi IV juga tidak ingin bulog menjadi pesaing swasta. Untuk itu pihaknya tidak ingin pihak swasta mempermainkan harga. Apalagi yang harusnya harganya beras standar harganya Rp 10 ribu, di pasaran harganya bisa sampai Rp 15 ribu. Selain itu menurutnya untuk proses pengepakan beras itu harganya hanya Rp 900, namun menurutnya harga beras di pasaran bisa sampai harga Rp 15 ribu. Karena hal inilah, harga tidak diatur yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi.





Lokasi kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida BPTP Balitbangtan Jambi Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis, 26 Oktober 2017 mendapat kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI. Kegiatan ini berlangsung lancar dan turut dihadiri oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Bapak Dr.Ir. Agung Hendriadi, M.Eng, Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Kementan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi serta stakeholder lainnya. Mitra kerjasama kegiatan jagung hibrida juga tampak hadir seperti Dirut. PT. Pertani, PT. Pusri, PT. Shang Hyang Sri dan PT. Usaha Baru Bersama yang sekaligus sebagai mitra pelaksanaan kegiatan di lapangan. Petani dan penyuluh cukup ramai turut serta pada acara yang bertujuan tinjau lokasi dan serap aspirasi. Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir pada acara reses ini dari berbagai Fraksi DPR RI dan pada kesempatan tersebut memberikan respon positif terhadap penyelenggaraan kegiatan serta memberikan motivasi kepada para petani jagung untuk bersemangat dalam mendukung kegiatan pengembangan jagung produksi anak bangsa.





Badan Ketahanan Pangan RI bersama Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke perkebunan Jagung yang berada di Kumpeh, Kabupaten Muarojambi. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi mengatakan DPR RI memang sudah memasukkan Jambi dalam agenda kerjanya karena memang secara nasional Jambi termasuk sentra pangan di Indonesia. Maka tentu dengan kunjungan ini ada masukan yang nantinya bisa menjadi bahan masukan baik untuk Komisi IV DPR RI maupun Badan Ketahanan Pangan RI. Ia mengatakan, saat ini produksi jagung di Indonesia cukup baik, bahkan mengalami surplus dari kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, kebutuhan akan jagung hanya 20 juta ton pertahun, sementara ketersediaan jagung di Indonesia mencapai 92 juta ton. Tinggal menjaga harga dan kualitasnya. Namun demikian, pihaknya terus berusaha untuk memperluasnya. Bahkan target tahun ini cetak lahan jagung lebih kurang 1 juta hektar. Saat ini, kata Agung, Indonesia memiliki sekitar 4,5 juta hektar lahan jagung. Dari satu hektar, akan menghasilkan lima ton.



*Kunjungan Kerja***Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR - RI, Viva Yoga Mauladi, M.Si, dan terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota. Rombongan didampingi oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Direktur Irigasi dari Kementerian Pertanian.

Maksud dan tujuan perjalanan dinas ke Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk mendampingi Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan dan juga untuk mencari aspirasi yang berkembang di kalangan pemerintah dan masyarakat. Di samping itu juga untuk mendapat masukan mengenai hasil-hasil dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.





Komisi IV DPR RI saat mengunjungi gudang Bulog Divre NTT ingin memastikan kualitas beras yang ada di dalam gudang sehingga Komisi IV meminta Bulog untuk membuka salah satu karung dan menimbang karung berisi beras tersebut. Komisi IV diterima Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Karyawan Gunarso. Pada saat itu, dilakukan penimbangan dan ternyata berat beras per kg 15,8 kg dan setelah dibuka ternyata beras cukup baik dan tidak berbau. Bahkan pimpinan Komisi IV sempat mengambil dengan tangan beras karung yang dibuka oleh petugas.

Pada kesempatan tersebut, Karyawan Gunarso mengatakan 99 persen beras yang ada di Bulog Divre NTT didatangkan dari luar NTT yakni dari Surabaya dan Makassar. Karena pengadaan di dalam NTT hanya 2000 ton saja. Sedangkan untuk kebutuhan setiap bulan yakni untuk Rastra sebanyak 8000 ton dan 2000 ton untuk ASN, TNI dan Polri.





Nusa Tenggara Timur memang punya fokus membangun sektor pertanian. Propinsi NTT bertekad menjadi lumbung jagung dan padi nasional

Gubernur NTT,
Frans Lebu Raya

SELAMAT DATANG KETUA & ANGGOTA KOMISI IV DPR RI Di Lokasi Cetak Sawah Desa Nunkurus Kupang Timur Kab. Kupang Prov. NTT

Ada sekitar 62 hektar lahan cetak sawah baru yang sudah ditanami padi di sana. Suara pompa air terdengar menderu dari kejauhan. Areal persawahan di sini mendapat pasokan air dari sumur yang dipompa.

Ketua cukup antusias melihat pemandangan tersebut. Menurutnya, selama ada air maka akan ada kehidupan, termasuk untuk menanam padi. Ini salah satu program cetak sawah yang berhasil. Dengan cetak sawah baru ini, Viva optimistis pertanian di NTT akan tumbuh pesat. Dia pun memastikan, Komisi IV mendukung penuh Provinsi NTT yang bertekad menjadikan daerah sebagai lumbung jagung dan sentra produksi padi.



*Kunjungan Kerja***Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Kalimantan Barat**

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang diproduksi sendiri oleh masyarakat sekitar dan mengapresiasi adanya Alsintan center dan unit usaha yang notabene merupakan karya-karya anak bangsa yang tidak kalah dengan negara lain. Sayangnya untuk daerah Kalbar sendiri belum seutuhnya menggunakan Alsintan produk dalam negeri saat mengunjungi Alsintan Center dan Unit Usahanya di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat.

Jika seluruh industri pertanian di Kalbar menggunakan Alsintan produk lokal yang tidak kalah dengan produk impor, maka akan banyak membawa manfaat, diantaranya penyerapan banyak tenaga kerja. Penyerapan banyak tenaga kerja itu juga secara langsung mengurangi jumlah pengangguran, sekaligus meningkatkan penghasilan keluarga. Karena mampu menghasilkan produksi padi petani dengan jumlah yang tidak kalah besar dari Alsintan produk impor dan akan memudahkan petani mencari sparepart mesin jika dikemudian hari mesin yang digunakan rusak.





Anggota Komisi IV DPR RI O.O Sutisna mempertanyakan pendapat para petugas Balai Karantina Pertanian Tingkat I Pontianak, Kalimantan Barat terkait wacana penggabungan Balai Karantina Pertanian dengan beberapa Balai Karantina di bawah kementerian lain dalam sebuah Badan Karantina. Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke Pontianak, Kalimantan Barat. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPR lainnya, Ichsan Firdaus mempertanyakan keefektifan Balai Karantina Pertanian dalam berkordinasi dengan Balai Karantina lainnya jika ditemui kasus yang menyangkut wewenang dari Balai Karantina lainnya, seperti Balai Karantina Perikanan. Pertanyaan tersebut menyusul penjelasan dari Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak sempat

menyinggung bahwa jika pihaknya menemukan kasus yang terkait karantina ikan, maka pihaknya akan langsung berkordinasi dan menyerahkannya kepada Karantina Perikanan yang kantornya berjarak sekitar 1 jam dari Kantor Balai Karantina Pertanian. Menjawab hal tersebut, baik Kepala Balai Karantina Pertanian dan Kepala Balai Karantina Perikanan yang hadir pada kesempatan itu mengatakan bahwa pada dasarnya apa yang ditentukan oleh pemerintah pusat terkait wacana akan digabungkannya beberapa balai menjadi sebuah badan tidak menjadi permasalahan untuk mereka.





Komisi IV DPR RI mengkritisi kondisi Gudang Pupuk Sriwijaya, Kalimantan Barat yang basah dan tidak memadai. Hal tersebut terungkap saat Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan meninjau Pabrik Pupuk Sriwijaya, Wajo Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat. Kedatangan Kami (Komisi IV DPR) meninjau gudang pupuk ini untuk memastikan ketersediaan pupuk sekaligus pendistribusiannya ke seluruh wilayah di

Kalimantan

Barat ini agar tidak telat.

Pasalnya sekitar dua bulan yang lalu kami sempat mendapat laporan dari para petani Kalimantan Barat akan keterlambatan pasokan pupuk. Peristiwa ini jangan sampai terjadi lagi. Namun setelah kami melihat sendiri, kami malah mendapati kondisi gudang pupuk yang kurang baik, lembab dan basah.





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA





BAB IV

KUNJUNGAN KERJA DPD-RI



Kunjungan Kerja Spesifik **Komite II DPD-RI ke Provinsi Jawa Timur**



Komite II DPD RI minta pengelolaan pupuk bersubsidi di Jawa Timur makin baik untuk mengurangi kekurangan pupuk bersubsidi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Muhamad Mirza Wardana, saat Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Petrokimia Gresik dan beraudiensi dengan Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi II Kementerian BUMN Purnomo Sinar Hadi, dan Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementerian Pertanian Muchlizar, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan jajaran manajemen PT. Petrokimia Gresik, yang diwakili oleh Direktur Keuangan Pardiman.

Di kesempatan yang sama senator Jawa Timur Ahmad Nawardi mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi mengakibatkan harga pupuk menjadi melonjak. Jika pupuk subsidi sudah langka, maka akan terjadi kenaikan harga hingga mencapai 100 persen dari yang ditetapkan pemerintah. Menurut Nawardi masyarakat masih melaporkan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di beberapa kecamatan di Jawa Timur. Faktanya pupuk bersubsidi yang sulit ditemui dikarenakan adanya temuan penjualan pupuk bersubsidi secara bebas di toko-toko pupuk dan bukan merupakan toko/kios pupuk yang dimandatkan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi.



Kunjungan Kerja Spesifik Komite II DPD-RI ke Provinsi Sulawesi Selatan



Wakil Ketua Komite II DPD I Kadek Arimbawa beserta 9 anggota DPD melakukan kunjungan kerja ke Kab. Maros Propinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan tugas pokok salahnya adalah yaitu mengenai pengawasan Undang-undang Pangan Nasional. Dalam kunjungan kerjanya Anggota DPD Komite II diterima oleh Wakil Bupati Kab. Maros Drs. H. A. Harmil Mattotorang, MM beserta jajaran SKPD Pemkab Maros. Kebijakan (UU Nomor 18 Tahun 2012) tentang Pangan mengamatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan

berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan yang lain, Komite II Dewan Perwakilan Daerah [DPD] RI meninjau gudang pengolahan beras premium, di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan ditemani oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementan. Ketika itu, penanggung jawab gudang PD Pangan Jaya, mengaku pengolahan miliknya berkapasitas 1.000 ton per bulan dan sudah memiliki mitra tani lebih dari 200 pemasok.



Kunjungan Kerja Spesifik

Komite II DPD-RI ke Provinsi Sumatera Barat

Tingginya pertambahan jumlah penduduk Indonesia menjadi masalah bagi penyediaan pangan di Tanah Air. Otomatis hal itu membuat perubahan pola dan tingkat penyediaan serta konsumsi pangan, termasuk akses pangan. Dengan tingginya pertambahan jumlah penduduk ini. Tentunya membutuhkan strategi dalam mengatasi persoalan pangan dalam rangka Pengawasan Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Kunjungan Kerja Spesifik Ketua Komite II DPD RI ke Sumatera Barat kali ini didampingi oleh Kapus Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Komite II DPD RI menilai selama ini Indonesia mengandalkan impor pangan dari luar. Memang, impor beras itu diperbolehkan di mana cadangan nasional tidak mencukupi. Menurutnya ada beberapa persoalan pangan di Indonesia. Pertama, tentang konsep kedaulatan pangan dan ketahanan yang seolah digabung dalam UU Pangan. Padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda. Masalahnya, konsep ketahanan pangan tidak mempersoalkan dari mana pangan tersebut dihasilkan atau dengan cara apa pangan tersebut dihasilkan

Persoalan Kedua, masih karut-marutnya data pangan yang tersedia di Indonesia. Pada tahun 2016 lalu, terdapat perbedaan data konsumsi beras antara Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah menyatakan angka konsumsi 139,15 kilogram (kg) per kapita per tahun, sedangkan prognosa BKP 124,89 kg per kapita per tahun. Hal ini menyebabkan kebijakan antarkementerian tidak terkordinasi dengan baik. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Efendi menjelaskan untuk jumlah produksi bawang merah di Sumbar terbesar se-Sumatera. Namun harga bawang merah sering bergejolak. Ternyata empat bulan lalu mengalami penurunan harga yang drastis. Sehingga petani bawang mengalami keresahan. Efendi menambahkan di Sumbar juga banjirnya bawang merah dan cabai dari Jawa Tengah. Pasalnya, harga bawang dan cabai lebih murah dibandingkan dari Sumbar. Akibatnya petani mengalami kerugian. Dikesempatan yang sama, Senator asal Sumbar Emma Yohanna mengusulkan Badan Urusan Logistik (Bulog) menyiapkan dua storage atau control atmosphere storage (CAS). Hal itu tentunya untuk mengatasi banjirnya bawang dan cabai Sumbar. Storage ini bisa membantu untuk tiga bulan kedepan



Kunjungan Kerja Spesifik **Komisi II DPD-RI ke Provinsi Kalimantan Timur**

di Provinsi Kalim

anggal 19 No

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia, masih ada hal yang perlu ditindak lanjuti dengan serius yaitu aspek penyediaan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite II DPD-RI Aji Muhamad Mirza Wardana saat kunjungan kerja dalam rangka pengawasan UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Kunjungan kali ini didampingi oleh Kepala Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementan. Dirinya juga menambahkan permasalahan penyediaan

pangan salah satunya disebabkan oleh perubahan cuaca dan iklim. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyediaan pangan menurut Aji adalah memperketat kualitas bahan pangannya. Aji juga menghimbau agar Indonesia memiliki lahan gandum yang baik. Karena menurutnya adalah keniscayaan jika lahan gandum harus ada dan dikelola dengan baik, mengingat salah satu makanan di Indonesia adalah roti dan mi instan, namun Indonesia masih mengimpor gandum dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan industri makanan di Indonesia.



Kunjungan Kerja Spesifik Komite II DPD-RI ke Provinsi Belitung



Komite II DPD RI meminta pemerintah mengkaji kembali izin pembuatan Hutan Tanaman Industri di Kecamatan Sijuk, Bangka Belitung. Keberadaan HTI ditentang masyarakat karena menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Komite II DPD RI bersama Direktur Tanaman Semusim dan Rempah mendapati persoalan ada beberapa kawasan hutan di Bangka Belitung yang dijadikan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) salah satunya di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Keberadaan HTI atas Nama PT. Agro Pratama Sejahtera (APS) ini masih menimbulkan kontra dari masyarakat di sekitarnya.

Aji Muhammad Mirza Wardana selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI menjelaskan bahwa penolakan HTI ini bukan hanya dilihat dari dampak yang akan muncul di Kabupaten Belitung, namun juga dari prosesi pengurusan

dokumen perusahaan HTI yang dinilai masih bermasalah. Lebih lanjut Aji menjelaskan, pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Jakarta tanggal 23 Agustus 2017 silam di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan perusahaan terkait sudah terima SP3 namun tidak ada respon dari pihak PT. APS. Maka, DPD akan mendorong penghentian pembuatan HTI di Kecamatan Sijuk, karena merusak lingkungan seperti penebangan hutan yang berpotensi memunculkan banjir dan permasalahan lingkungan hidup yang lainnya. Solusi yang terbaik untuk masyarakat adalah mendorong dorong secepat mungkin izin perusahaan tersebut dicabut.





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA





BAB V

PENGHARGAAN TELADAN NASIONAL 2017



Penghargaan Teladan Nasional Petani Teladan 2017



Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini kembali memberikan penghargaan kepada petani, kelembagaan ekonomi petani, penyuluh pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan yang berprestasi. Tahun 2017 ini, pemerintah memberikan kepada 15 teladan dan berprestasi dengan masing-masing mendapatkan hadiah Rp 20 juta. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya mengatakan, pertanian Indonesia kini sudah maju. Bahkan kini Indonesia tak impor beras dan jagung lagi. Selain komoditas pangan, Amran juga menegaskan, bahwa pemerintah juga berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan

perkebunan, terutama rempah-rempah. Saat ini ada alokasi anggaran sebanyak Rp 5,5 triliun untuk perkebunan dan hortikultura. Mentan menampik bahwa pemerintah tidak menyayangi petani. Justru pemerintah sangat menyayangi petani. Salah satu buktinya, kata Amran adalah program asuransi pertanian untuk melindungi petani dari gagal panen. Begitu juga bantuan pemerintah untuk memperbaiki 3 juta hektare irigasi yang rusak.





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

